



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.531/2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha sektor tertentu melalui penghitungan nilai Upah Minimum Sektoral Provinsi;
- b. bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.404/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.125/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2025;

Memperhatikan : Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 500.15.14.1/7351/DTKT-IV Tanggal 9 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum sebagaimana diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektorial Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025
sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Desember 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

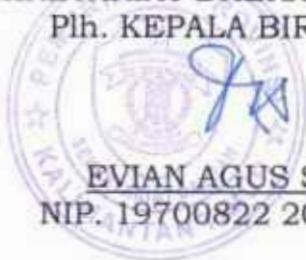
ttd

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
11. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



EVIAN AGUS SAPUTRA
NIP. 19700822 200112 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.531/2024
TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM
SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

No	Nama Sektor/ Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025 Per Bulan (Rp)
1	Perkebunan Sawit/01262	Rp. 3.633.003,48 (tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga rupiah empat puluh delapan sen)
2	Kehutanan/022	Rp. 3.650.900,05 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah lima sen)
3	Batu Bara/0510	Rp. 3.722.486,32 (tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh dua sen)
4	Minyak dan Gas/06	Rp. 3.758.279,46 (tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh enam sen)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



EVIAN AGUS SAPUTRA
NIP. 19700822 200112 1 002